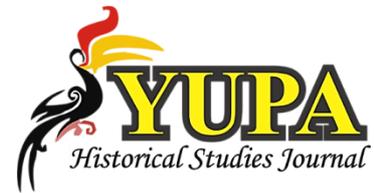


P-ISSN: 2541-6960; E-ISSN: 2549-8754

Yupa: Historical Studies Journal

Vol. 6 No. 2, 2022 (111-124)

<http://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/yupa>



## Dinamika Politik Kerajaan – Kerajaan Lokal di Sulawesi Selatan: Dari Persekutuan Diplomasi Hingga Konfrontasi Perebutan Superioritas (Abad XV-XVII)

Khaeruddin

Universitas Negeri Makassar, Indonesia  
khaeruddin@unm.ac.id

Received	Accepted	Published
15/08/2022	30/11/2022	10/12/2022

**Abstract** *This article discusses the political dynamics of local kingdoms in South Sulawesi from alliances to confrontations for power struggles in the XV-XVII centuries. The research method used is a literature review with historical methods namely, heuristics, criticism, interpretation and historiography. In this study, the results of the discussion showed that there were several local kingdoms. It was these local kingdoms that later became the forerunner of the present-day South Sulawesi province. As a unitary region, local kingdoms have a territory that stretches with certain boundaries that limit the territory of one kingdom to the territory of another kingdom. Based on written literature or oral sources, we can find out about the kingdoms that once existed such as the Luwu Kingdom, Gowa Kingdom, Bone, Soppeng, Wajo and several other kingdoms. All of these kingdoms had become part of the institutions of authority and power in South Sulawesi in its early existence, beginning with the myth of the appearance of To Manurung (the one who descended from the sky). And in subsequent developments, the Gowa kingdom emerged as the ruler which then created the Makassar war, ending with the defeat of Gowa and its allies which then featured Bone and Soppeng as rulers. Politically, the Bone Kingdom then held the hegemony of power since the end of the Makassar War until the early twentieth century.*

**Keywords:** Political, Kingdom, South Sulawesi

**Abstrak** *Artikel ini membahas mengenai dinamika politik kerajaan lokal di Sulawesi Selatan dari persekutuan sampai dengan konfrontasi perebutan kekuasaan abad XV-XVII. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan metode sejarah yakni, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Dalam kajian tersebut didapat hasil pembahasan yakni telah terdapat beberapa kerajaan-kerajaan lokal. Kerajaan-kerajaan lokal tersebut lah yang kemudian menjadi cikal bakal wilayah provinsi Sulawesi Selatan sekarang ini. Sebagai suatu kesatuan wilayah, kerajaan-kerajaan lokal memiliki wilayah kekuasaan yang terbentang dengan batas-batas tertentu yang membatasi wilayah kerajaan yang satu dengan wilayah kerajaan yang lain. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah, yakni Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Berdasarkan literatur tertulis ataupun sumber lisan, kita dapat mengetahui kerajaan-kerajaan yang pernah ada seperti Kerajaan Luwu, Kerajaan Gowa, Bone, Soppeng, Wajo dan beberapa kerajaan lainnya. Kesemua kerajaan-kerajaan tersebut telah menjadi bagian dari institusi penguasa dan kekuasaan di Sulawesi Selatan pada masanya yang awal keberadaannya diawali dengan mitos kemunculan To Manurung (orang yang turun dari langit). Dan dalam perkembangan selanjutnya memunculkan kerajaan Gowa sebagai penguasa yang kemudian tercipta perang Makassar, berakhir dengan kekalahan Gowa beserta sekutunya yang kemudian menampilkan Bone dan Soppeng sebagai penguasa. Secara politik Kerajaan Bone selanjutnya memegang hegemoni kekuasaan sejak berakhirnya Perang Makassar sampai awal abad XX.*

**Kata kunci :** Politik, Kerajaan, Sulawesi Selatan



This work is licensed under a  
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki karakteristik budaya yang plural dan kompleks. Pluralitas budaya itu tercermin dalam aneka ragam etnik, bahasa, agama, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Itulah sebabnya budaya politik lokal di Indonesia bukan hanya bermacam-macam dan berbeda antara satu etnik dengan etnik lainnya, melainkan perkembangannya juga dipengaruhi oleh kompleksitas nilai yang ada dalam suatu masyarakat itu sendiri. Demikian pula di berbagai wilayah etnik di Sulawesi Selatan yang pernah muncul sebagai kerajaan-kerajaan besar dan kecil, memiliki jati diri budaya sendiri, memiliki identitas dan kebanggaan sendiri (Amir, 2018).

Indonesia pada masa lampau memiliki banyak kerajaan-kerajaan besar dan penting dalam sejarah Indonesia. Salah satu indikator untuk mengukur besarnya suatu kerajaan adalah dengan melihat hegemoninya terhadap kerajaan-kerajaan di sekitarnya maupun yang berada di titik terjauh dari pusat pemerintahannya (Habrianto et al., 2019). Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dalam perjalanan sejarahnya, telah terdapat beberapa kerajaan-kerajaan local (Malli & Yahya, 2021), seperti Luwu, Bone, Lamuru, Wajo, Cina (Pammana), Soppeng, Barru, Tanete, Segeri, Siang, Pangkajenne, Gowa, Tallo, Galesong, Sanrobone, Binamu, Bangkala, Bantaeng, Bonto Bangung, Tiro, Bulukumba, Lamatti, Tondong, Bulu-Bulu, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau', Simbang, Bontoa, Maiwa, Enrekang, Duri, Kassa, Batu Lappa, Sidenreng, Sawitto, Suppa, Rappeng Alitta dan lain-lain (Yani, 2020).

Kerajaan-kerajaan lokal tersebut lah yang kemudian menjadi cikal bakal wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sekarang ini. Sulawesi Selatan terdiri dari 4 suku utama, yaitu suku Makassar, suku Bugis, suku Mandar dan suku Toraja (Prabowo & Kalsum, 2021). Sebagai suatu kesatuan wilayah, kerajaan-kerajaan lokal memiliki wilayah kekuasaan yang terbentang dengan batas-batas tertentu yang membatasi wilayah kerajaan yang satu dengan wilayah kerajaan yang lain. Berdasarkan literatur tertulis ataupun sumber lisan, kita dapat mengetahui kerajaan-kerajaan yang pernah ada seperti Kerajaan Luwu, Kerajaan Gowa, Bone, Soppeng, Wajo dan beberapa kerajaan lainnya. Kesemua kerajaan-kerajaan tersebut telah menjadi bagian dari institusi penguasa dan kekuasaan di Sulawesi Selatan yang diawali dengan kemunculan To Manurung (orang yang tidak diketahui asal-usulnya) sebagai peletak dasar kekuasaan dan penguasa pertama di kerajaan-kerajaan tersebut.

Kemunculan To Manurung ini lah kemudian yang menjadi semacam pemersatu antar berbagai kelompok masyarakat yang berdiam dalam satu wanua yang pada akhirnya membentuk suatu institusi kekuasaan yang disebut kerajaan dan kedatuan. Masing-masing kerajaan tersebut hidup berdampingan atau bahkan saling berebut kekuasaan untuk menunjukkan superioritas atas kerajaan yang lain.

Dalam mempertahankan eksistensi dan kedaulatan kerajaan tersebut, maka masing-

masing kerajaan melakukan persekutuan sebagai upaya ikatan diplomasi dalam rangka menghindari hegemoni kekuasaan kerajaan lain dengan cara mengikatkan diri dalam satu perjanjian persekutuan sebagai saudara. Perjanjian persekutuan yang pernah terjadi seperti Perjanjian Tellumpocoe yang melibatkan Kerajaan Bone, Kerajaan Wajo dan Kerajaan Soppeng. Persekutuan Tellu Limpoe yang terjadi antara Kerajaan Bulu-Bulu, Tondong dan Lamatti. dan Persekutuan Limae Ajattappareng yang mencakup Sawitto, Suppa, Alitta, Sidenreng dan Rappang serta berbagai persekutuan atau perjanjian yang tercipta antara Kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Upaya persekutuan dengan cara perjanjian persaudaraan, bagi masing-masing kerajaan memiliki keuntungan tersendiri baik bagi kerajaan yang dianggap memiliki kekuatan yang cukup besar ataupun kerajaan yang kecil atau dengan kata lain persekutuan yang simbiotis.

Dalam hal persekutuan masing-masing kerajaan memiliki patron. Patron tersebut dianggap sebagai kekuatan unggul yang dapat dijadikan sebagai tempat perlindungan. Sekitar Abad XV-XVI di kawasan ini terdapat dua kerajaan dan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kerajaan-kerajaan di sekitarnya yakni Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa. Kedua kerajaan tersebut saling berebut pengaruh dan berusaha tampil sebagai kekuatan yang unggul yang kemudian berusaha mencitrakan dirinya bahwa baik Kerajaan Bone ataupun Kerajaan Gowa merupakan patron utama dalam hal kekuasaan ataupun pangaddereng di jazirah Sulawesi ini. Kerajaan Bone menjadi patron pangaddereng Tana' Ugi (negeri-negeri Bugis), dan Kerajaan Gowa menjadi patron pangaddereng Butta Mangkasara (negeri-negeri orang Makassar), maka terjadilah persaingan terus menerus dalam abad XV-XVI, dengan cara memperluas wilayah kekuasaan masing-masing (Mattulada, 1998). Bahkan persaingan ini berlanjut sampai pada abad XVII. Tepatnya di abad XVII inilah kemudian terjadi perubahan drastis di jazirah ini dan yang kemudian melahirkan suatu keadaan yang membedakan dengan keadaan sebelumnya dengan tokoh utamanya adalah Latenritatta Arung Palakka.

## **METODE**

Menjadi syarat mutlak dalam tulisan sejarah harus ada metode penelitian yang berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, populasi dan sampel (sasaran penelitian), instrumen dan teknik analisis data penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan 4 tahapan, yakni : Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Heuristik adalah proses mengumpulkan sumber atau referensi sejarah yang bersangkutan dengan penelitian (Madjid et al., 2018). Pada penelitian ini, salah satu sumber utama yang digunakan adalah buku dari Abdul Qahhar berjudul 'Batarana Tana Bone Matasilompoe Manurungnge ri Matajang' , buku dari Mattulada yang berjudul 'Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan' dan 'Menyusuri Jejak

Kehadiran Makassar Dalam Sejarah' serta buku 'Warisan Arung Palakka' karya Leonard Y. Andaya. Kemudian langkah selanjutnya adalah Kritik Sumber. Kritik adalah penyaringan sumber sehingga diperoleh fakta seobjektif mungkin. Interpretasi adalah proses pemknaan fakta sejarah (Yulia et al., 2019). Historiografi merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah, setelah melalui fase heuristik, kritik, dan interpretasi. Pada tahap terakhir inilah penulisan sejarah dilakukan (Hermin et al., 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sekilas Kerajaan Bone**

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Kerajaan Bone merupakan salah satu kerajaan besar yang saling berebut kekuasaan dengan rival utamanya adalah Kerajaan Gowa. Kerajaan Bone sebagaimana dengan kerajaan lokal lainnya di kawasan Sulawesi Selatan ini, diawali dengan adanya To Manurung. Sebagaimana digambarkan bahwa To Manurung di Kerajaan Bone dikenal dengan To Manurung ri Matajang, dimana sebelum kedatangan To Manurung ini keadaan negeri mengalami kekacauan. Setidaknya ada tujuh negeri atau wanua yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kerajaan Tana' Bone yakni Wanua Ujung, Tibojong, Ta', Tanete ri Attang, Tanete ri Awang, Ponceng dan Macege (Patunru, 1989). Perlu pula ditekankan bahwa sebelum Kerajaan Bone terbentuk hasil dari persekutuan dari ketujuh wanua tersebut, telah ada Kerajaan-kerajaan kecil yang lebih tua yakni, Kerajaan Awangpone, Kerajaan Pattiro, Kerajaan Cina, Kerajaan Palakka (Ali, 1969) walaupun pada dasarnya kemungkinan keempat kerajaan tersebut hanya sebagai kelompok kekuasaan kecil yang dalam bahasa Bugis kita sebut wanua (kampung).

Dari ketujuh Wanua tersebut-lah yang kemudian seiring perkembangan zaman akhirnya wilayah Kerajaan Bone semakin bertambah karena penaklukan ataupun karena kesukarelaan untuk bergabung. Memasuki era abad XVI dan awal abad XVII terjadi dinamika keadaan di Kerajaan Bone. Perang dan intrik antar kerajaan tetangga, proses perdamaian, proses mencari sekutu sampai dengan proses islamisasi. Kerajaan Bone sendiri berhasil diislamkan pada tahun 1611. Setelah sebelumnya Kerajaan Wajo pada tahun 1610, Soppeng dan Sidenreng pada tahun 1609 (Pelras, 2006).

Kerajaan Bone dalam kurun waktu abad XVI mampu menjadi salah satu kerajaan yang kuat dan berpengaruh serta disegani didaerah ini khususnya di daerah timur Sulawesi Selatan jika dilihat dari segi letak geografisnya dan juga berpengaruh diantara kerajaan Bugis jika dilihat dari konteks kesukuannya. Hal ini dapat kita lihat dari pemerintahan Raja Bone V, La Tenrisukki Mappajungnge yang memerintah pada tahun 1508-1535, Raja Bone VI La Ulio Bote'E pada tahun 1535-1560 serta Raja Bone VII, La Tenrirawe Bongkang'nge pada tahun 1560- 1578 (Mattulada, 1998).

Pemerintahan dari tiga raja tersebut diatas, membawa kemajuan sekaligus

membuktikan pengaruh dan kekuatan Kerajaan Bone. Dimasa La Tenrisukki Mappajungnge melakukan usaha perluasan wilayah dengan cara peperangan dan penaklukan bahkan dapat mengalahkan pasukan Luwu dalam Perang Cenrana (1509) yang kemudian diakhiri Perjanjian perdamaian Polo' Malelae ri Unnyi (Edward L.Poellinggomang dkk, 2004). Perjanjian ini menandai berakhirnya supremasi Luwu atas kerajaan-kerajaan Bugis lainnya di Sulawesi Selatan (Gibson, 2009). Sementara pada masa pemerintahan La Ulio Bote'E, Kerajaan Bone giat meningkatkan pembinaan dan konsolidasi internal dalam rangka memelihara dan memperkuat kekompakan serta mempertinggi semangat juang pasukan Kerajaan Bone (Patunru, 1989). Dimasa raja ini pulalah terjadi perjanjian antara Kerajaan Bone dengan pihak Kerajaan Gowa yang diwakili oleh Raja Gowa IX Tu Maparrisi Kallonna yang dikenal dengan Perjanjian Tamalate yang juga disebut "Sitettongenna Sudangae Lateariduni" (Ali, 1969).

Dimana isi perjanjian ini menandakan persaudaraan yang sederajat yang akan saling menghargai dan saling membantu dalam kesukaran (Ali, 1969). Kerajaan Bone semakin menguatkan kedudukannya pada masa raja berikutnya La Tenrirawe Bongkangnge. Pada masa ini pecah perang dengan Kerajaan Gowa yang dipimpin I Mario Gau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng (Raja Gowa X) dan saudaranya I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatta (Raja Gowa XI) dimana serangan Kerajaan Gowa ini mampu dipukul mundur oleh pihak pasukan Bone. Perang yang berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun ini diakhiri dengan Perjanjian Caleppa. Perjanjian ini memberikan keuntungan bagi Kerajaan Bone dimana sebelumnya wilayah yang berada dibawah pengaruh Kerajaan Gowa beralih dibawah kendali Kerajaan Bone (Mattulada, 1998). Selain dari perjanjian dengan Kerajaan Gowa tersebut, juga tercipta Persekutuan Tellumpocoe, yang melibatkan Kerajaan Bone, Wajo dan Soppeng. Ketiga kerajaan tersebut mengikrarkan diri dalam persaudaraan dan persekutuan politik. Latenrirawe pun berhasil menyokong terbentuknya Persekutuan Tellu Limpoe, antara Kerajaan Bulu-Bulu, Tondong dan Lamatti. Aliansi dari masing-masing persekutuan tersebut merupakan wujud konsolidasi Kerajaan Bugis menciptakan kemerdekaan, kedaulatan dalam negerinya dan menentang penaklukan kerajaan lain.

Kemajuan demi kemajuan yang telah diperoleh Kerajaan Bone merupakan pembuktian bahwa Kerajaan Bone pada kurun waktu abad XVI adalah salah satu kerajaan yang aktif mengembangkan pengaruh dan hegemoninya. Kemampuan pihak Bone untuk menunjukkan kekuatannya baik itu kekuatan militer atau fisik juga yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan diplomasi. Kemampuan diplomasi yang membuat Kerajaan Gowa mengakui kedaulatan dan mengabdikan keinginan pihak Bone yang justru agak merugikan pihak Kerajaan Gowa sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari isi Perjanjian Caleppa .

Adalah sesuatu yang menarik, bahwa Kerajaan Bone mampu membuat pihak Kerajaan Gowa untuk mengabdikan semua itu. Kemampuan diplomasi dapat juga lihat dari keberhasilan Kerajaan Bone membangun persekutuan politik. Baik Persekutuan Tellumpoccoe dan Persekutuan Tellu Limpoe.

Terlepas dari kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh Kerajaan Bone, pada masa raja-raja berikutnya Kerajaan Bone mengalami kemerosotan dan kehilangan kedaulatan secara perlahan-lahan. Konflik internal di dalam negeri dan konflik eksternal menjadi bagian dari dinamika perjalanan sejarah Kerajaan Bone sendiri. Kedaulatan dan pengaruh yang perlahan-lahan hilang diawali masa pemerintahan La Inca (Raja Bone VIII) dan pemerintahan La Tenrirua Sultan Adam (Raja Bone XI). Dimasa La Tenrirua ini dan La Tenripale To Akkapeang (Raja Bone XII), Kerajaan Gowa dibawah pemerintahan I Mangngarangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin (Raja Gowa XIV) dengan semangat penyebaran Islam berhasil mengalahkan Bone dan menjadikan Kerajaan Bone sebagai kerajaan Bugis terakhir yang memeluk agama Islam. Kalahnya Kerajaan Bone dalam proses islamisasi ini, maka Bone kemudian dijadikan salah satu vasal/ palili Kerajaan Gowa (Abdul Qahhar, 2011). Perubahan kedudukan dari yang sebelumnya sebagai kerajaan patron menjadi kerajaan vasal ini adalah awal bagi Kerajaan Bone menuju kearah sebagai negeri jajahan.

Seiring dengan hal itu, Bone pada masa berikutnya yakni, Kerajaan Bone pada masa La Maddaremeng (Raja Bone XIII). Pemerintahan La Maddaremeng inilah merupakan awal perubahan besar bagi kedaulatan Kerajaan Bone sebagai kerajaan yang merdeka dan berpengaruh. La Maddaremeng sebagai sosok raja yang taat dengan ajaran Islam berusaha menerapkan ajaran Islam secara murni baik didalam lingkup Kerajaan Bone hingga ke kerajaan-kerajaan tetangganya (Nabba, 2016). Berbagai kebijakan berusaha diterapkan sebagai tindak lanjut pemurnian ajaran Islam yakni, pengucilan bissu, melarang perjudian, minum arak, dan segala bentuk takhayul serta penghapusan perbudakan. Kebijakan yang terakhir ini menjadi puncak perseteruan dan menyulut pemberontakan yang dipimpin oleh ibunya sendiri (Hafid, 1989). Kebijakan yang berakibat konflik internal inilah kemudian yang justru membawa Kerajaan Bone kehilangan kedaulatan dan kemerdekaannya. We Tenrisoloreng Datu Pattiro yang juga ibu dari La Maddaremeng merupakan penentang utama kebijakan tersebut tersebut, yang kemudian telah mengundang pihak Kerajaan Gowa untuk terlibat dalam konflik dalam negeri Kerajaan Bone yang kemudian menjadi alasan untuk menaklukkan Kerajaan Bone sendiri (Patunru, 1989).

Kerajaan Bone akhirnya dapat ditaklukkan dan dijadikan kerajaan bawahan oleh Kerajaan Gowa setelah terlibat perang sengit pertama pada tahun 1643-1644 yang dipimpin oleh La Maddaremeng dan perang kedua pada tahun 1646 yang dipimpin oleh La Tenriaji Tosenrima yang kemudian disebut *Betae ri Pasempe* (Ali, 1969). Kekalahan Bone dalam

perang terakhir ini tercatat dalam lontara bugis “tellenni mataessona Bone ri Pasempe, namapettanna atuwo-tuwonna nenniya makecceni to Bone” (Tenggelamlah matahari Bone di Pasempe. Gelaplah penghidupannya dan kedinginanlah orang Bone) (Qahar, 2010). Kedaulatan Kerajaan Bone akhirnya hilang yang semenjak dari Raja Bone I Manurungge ri Matajang sampai Raja Bone XII La Tenriruwa Sultan Adam mampu menjadi salah satu kerajaan terkuat dan memegang kendali dikawasan timur Sulawesi Selatan. Perubahan keadaan Kerajaan Bone ini tergambarkan dalam lontara “naripoatana Bone seppulopitu taung ittana” yang artinya, maka diperbudaklah Bone tujuh belas tahun lamanya (Nabba, 2016). Bone tidak hanya menjadi daerah bawahan tapi bahkan menjadi “budak” bagi Kerajaan Gowa (Andaya, 2013).

Kerajaan Bone yang mula berdirinya pada abad XIV sampai abad XVI telah menunjukkan dirinya sebagai kerajaan yang cenderung memperluas dan mempermantap kekuasaannya, kini memasuki dekade awal abad XVII posisi dan keadaan tersebut berbalik, mengalami perubahan drastis. Dari kerajaan merdeka, berdaulat dan patron bagi sebagian kerajaan lain kini beralih menjadi kerajaan yang terjajah bahkan menjadi budak bagi kerajaan terbesar di Jazirah Sulawesi ini yakni Kerajaan Gowa. Kemenangan Gowa atas Bone menjadikan Gowa sebagai satu-satunya penguasa terkuat di Sulawesi Selatan (Koro, 2006).

### **Hegemoni dan Takluknya Kerajaan Gowa Abad XVII**

Kerajaan Gowa merupakan salah satu kerajaan terbesar dan banyak mengalami keberhasilan pada abad ke-16 dan abad ke-17 terutama pada masa pemerintahan I Mangarangi Daeng Manrabbia (Mutmainnah et al., 2021). Merupakan kerajaan yang memiliki kekuatan politik terbesar di Sulawesi Selatan bahkan sebagai pemegang hegemoni di kawasan Indonesia Timur. Kemuculan Gowa sebagai kekuatan politik sudah mulai dirintis pada awal Abad XVI sejak pemerintahan Raja Gowa IX, Daeng Matanre Karaeng Manguntungi Tu Maparisi Kallonna (1510-1546). Hal ini sebagaimana diungkapkan Mattulada:

Pada zaman kekuasaan Raja Gowa ke-9, Daeng Matanre Karaeng Manguntungi Tu-Mapa'risi Kallonna, tercapai banyak kemajuan dalam lapangan politik, ekonomi dan kekuatan peperangan, termasuk pendirian benteng-benteng pertahanan di Pantai Makassar. Dengan kekuatan itu, dilaksanakan kegiatan yang lebih effensif lebih daripada sebelumnya. Ditaklukkannya negeri-negeri Garassi, Katingang, Parigi, Siang (Pangkajene), Sidenreng, Lembangan (Bantaeng), Bulukumba, Selayar, Panaikang, Mandalle', Campa, Marusu', dan Polombangkeng (Mattulada, 1998).

Raja Gowa IX juga berhasil menyatukan Kerajaan Gowa dan Tallo dengan ikrar bersama bahwa Raja Tallo menjadi Karaeng Tu Mabbicara Butta atau mangkubumi (Perdana Menteri) Kerajaan Gowa (Edward L.Poelinggomang dkk, 2004). Keduanya digabung menjadi kerajaan kembar “Rua Karaeng na Se're Ata” Dua Raja tetapi Satu Hamba/ Rakyat (D, 1992). Kerajaan kembar ini kemudian lazim disebut Kerajaan Makassar. Raja ini setidaknya telah membangun pondasi kebesaran Kemaharajaan Gowa yang kemudian diwarisi oleh raja setelahnya.

Kerajaan Gowa semakin mengembangkan dunia kemaritimannya. Kebijakan maritim

Kerajaan Gowa dijalankan bersamaan dengan berlanjutnya berbagai upaya untuk menguasai seluruh Sulawesi Selatan yang berlangsung antara 1570 dan 1591 (Pelras, 2006). Awal abad XVII ini juga oleh Kerajaan Gowa dibawah kepemimpinan Raja Gowa XIV I Mangarangi Daeng Manrabia Karaeng Lakiung Sultan Alauddin dan mangkubuminya sekaligus Raja Tallo, I Mallingkaang Daeng Manyonri Sultan Abdullah Awalul Islam Karaeng Matowaya telah berhasil menyebarkan Agama Islam disebagian besar wilayah Sulawesi Selatan. Penyebaran Agama Islam sebagai doktrin penyebaran jalan keselamatan yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa secara sosial budaya menempatkan Kerajaan Gowa sebagai institusi penjaga doktrin keagamaan tersebut juga sekaligus secara sosial politik menempatkan Gowa sebagai kerajaan yang secara tidak langsung menguasai Jazirah Sulawesi Selatan ini.

Menurut Ahmad M.Sewang Islamisasi yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa setidaknya melalui dua cara yakni, dengan cara damai dan melalui peperangan (Sewang, 2005). Dengan didasari perjanjian kerajaan-kerajaan terdahulu, "bahwa barangsiapa yang menemukan jalan yang lebih baik, maka ia berjanji akan memberitahukan (tentang jalan yang baik itu) kepada raja-raja sekutunya" (Mattulada, 1998). Dengan dasar ini kemudian Kerajaan Gowa menyampaikan ajakan memeluk Agama Islam ini oleh seluruh kerajaan-kerajaan tetangganya. Ajakan secara damai ini disambut dengan baik oleh Kerajaan Sawitto, Balannipa, Bantaeng dan Selayar (Sewang, 2005).

Ajakan secara damai ini ternyata ditolak keras oleh sebagian kerajaan-kerajaan besar di jazirah ini khususnya Kerajaan-Kerajaan Bugis yang tergabung dalam persekutuan Tellumpoccoe, yaitu Bone, Soppeng dan Wajo. Penolakan oleh Kerajaan-Kerajaan Tellumpoccoe ini dianggap hanya sebagai upaya untuk atau siasat untuk menguasai mereka (Sewang, 2005) atau dengan kata lain, islamisasi ini sebagai motif politik semata oleh Kerajaan Gowa. Kerajaan-Kerajaan Bugis menganggap dalih penyebaran Agama Islam ini adalah sebagai kelanjutan perang-perang masa lalu, yang sama sekali tidak mempunyai alasan keagamaan, melainkan tujuan-tujuan perebutan kekuasaan tunggal di Sulawesi Selatan semata-mata (Mattulada, 1998).

Akibat dari penolakan tersebut maka menjadi alasan bagi Kerajaan Gowa untuk melancarkan serangan melalui dua arah, yaitu: melalui arah barat ke daerah Sawitto dan Rappang dan menyusul dari arah selatan melalui Tanete dan Barru (Sewang, 2005) yang kemudian berturut-turut berhasil mengislamkan Kerajaan-Kerajaan Tellumpoccoe tersebut, Soppeng pada tahun 1609, disusul Wajo tahun 1610 dan kemudian terakhir Bone pada tahun 1611. Dengan masuknya Islam Kerajaan Bone maka seluruh wilayah Sulawesi Selatan telah menerima Islam, kecuali daerah Tana Toraja (Edward L.Poelinggomang dkk, 2004). Penerimaan Islam bagi Kerajaan Bone memberikan arti tersendiri bagi Kerajaan Gowa, sebab untuk pertama kalinya Gowa dapat menguasai seluruh Kerajaan-kerajaan Bugis

(Sewang, 2005). Terkait dengan hal ini, bahwa proses Islamisasi selain juga sebagai upaya untuk penyebaran agama juga secara langsung menjadikan Gowa sebagai kerajaan yang paling kuat dan menunjukkan dirinya sebagai kerajaan superior. Konsekuensi dari ini kemudian menjadikan hegemoni Gowa di Sulawesi Selatan pada awal abad XVII semakin tampak.

Kerajaan Bone yang merupakan musuh lama bagi Kerajaan Gowa pun harus takluk kalah dan menerima Agama Islam yang dibawa oleh Gowa. Kendati proses islamisasi ini secara langsung tidak menunjukkan usaha ekspansi namun secara telak Kerajaan Bone harus mengakui superioritas Kerajaan Gowa. J.Noorduyn mengungkapkan bahwa bagi Gowa, arti pengiriman pasukan itu bukan hanya soal memenuhi kewajiban suci. Dalam hal ini, untuk pertama kali Gowa berhasil menaklukkan Kerajaan Bugis secara telak dan terutama Bone, musuh lamanya di semenanjung itu (Sewang, 2005). Takluknya Kerajaan Bone menandai berakhirnya proses islamisasi di kawasan ini. Kendali politik berada dibawah kekuasaan Kerajaan Gowa, stabilitas politik dan keamanan dari kerajaan kerajaan di sekitarnya berhasil dicapai. Setelah proses pengislaman ini terciptalah kedamaian dan ketentraman dikalangan Kerajaan-kerajaan Makassar dan Bugis (Mattulada, 2011). Kini Gowa semakin mempermantap kedudukannya untuk menjadi kerajaan terkuat di kawasan timur Nusantara. Disamping letak Kerajaan Gowa dengan bandar Somba Opu-nya yang strategis juga oleh Kerajaan Gowa giat menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain, apalagi setelah takluknya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 maka peluang Gowa untuk berkembang semakin terbuka lebar. Ekspansi politik ke luar pulau Sulawesi semakin gencar dilakukan.

Sampai tahun 1660, daerah-daerah luar Sulawesi Selatan yang tunduk pada kekuasaan Gowa Tallo yakni Bima (1616), Sumbawa, Salaparang (Lombok), Pulau Laut, Kutai, dan Berau (1618), Buton, Muna, Banggai, Pulau-pulau Sula, Pulau-pulau Solor-Sandowo (Flores), Sumba (1626), Gorontalo dan Manado (1634), Pulau-pulau Obi, Buru, Seram, Timor (1640), Pulau Aru dan Kei (1640), dan Australia Utara (1640) (Edward L.Poelinggomang dkk, 2004). Kerajaan Gowa selanjutnya dibawah kepemimpinan I Manuntungi Sultan Malikussaid (Raja Gowa XV) bersama mangkubuminya I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Patingalloang. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain nusantara semakin erat seperti dengan Mataram, Aceh, Banten dan raja-raja di Maluku (Mattulada, 2011). Selain itu kerja sama dan hubungan persahabatan dilakukan dengan negara-negara diluar Nusantara seperti dengan Gubernur Spanyol di Manila, Raja Muda Portugis di Goa (India), Presiden di Keling (Coromandel, India), Machante di Masulipatan (India), dengan Raja Inggris, Raja Portugis, Raja Kastilia (Spanyol) dan Mufti di Mekkah. Dilain sisi pada masa pemerintahannya persaingan dan benih-benih konflik dengan Belanda pun sudah mulai semakin memanas

walaupun tidak terjadi perang terbuka dengan pihak Belanda (Mattulada, 2011). Namun, keadaan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terjadinya perubahan besar yang terjadi di Jazirah Sulawesi Selatan ini. Bukan hanya perubahan politik tapi juga perubahan dari aspek sosial, ekonomi dan budaya.

Kejayaan dan keunggulan Gowa berlanjut pada Raja selanjutnya, I Mallombasi Daeng Mattawang Sultan Hasanuddin (Raja Gowa XVI) bersama dengan Karaeng Karunrung (putra Karaeng Patingalloang) Beliau harus mengendalikan pemerintahan yang berjaya ini ditengah-tengah keadaan yang sungguh genting menghadapi ancaman-ancaman dari Belanda (Mattulada, 2011). Konflik yang terjadi antara Kerajaan Gowa dengan pihak VOC semakin terbuka lebar. Dua tahun setelah penobatannya yakni pada April 1655, angkatan armada Kerajaan Gowa dibawah kepemimpinannya sendiri melakukan penyerangan kepada orang-orang Belanda yang menduduki Buton (Koro, 2006).

Di tengah ancaman Belanda, dua penguasa kerajaan ini, baik Sultan Hasanuddin dan Karaeng Karunrung menjalankan kebijakan kerajaan tampak berbeda. Khususnya kebijakan dalam negeri. Sultan Hasanuddin dalam menjalankan kekuasaannya terhadap kerajaan-kerajaan Bugis yang berlindung kepadanya diperlakukan seperti layaknya rakyat Gowa sendiri namun Karaeng Karunrung tampaknya mengambil sikap lain, dia memperlakukan orang Bugis terutama orang Bone tetap sebagai orang jajahan (ata') (Mattulada, 2011). Hal inilah kemudian menjadi benih konflik yang menjadikan permusuhan dalam negeri hidup kembali (Mattulada, 2011).

Pertengahan abad XVII, bagi Kerajaan Gowa menghadapi beberapa persoalan pokok yang menjadi tantangan eksistensi kejayaan dan kekuasaannya. Butta Gowa berada goncangan-goncangan yang amat besar, krisis kekuasaan terjadi dalam negeri (Mattulada, 1998). Oleh Mattulada, dikatakan bahwa pertengahan abad XVII Kerajaan Makassar mengalami kelapukan dari dalam, atau dalam hal terjadi masalah internal. Hal yang dimaksud yakni:

1. Bangkitnya kembali semangat dan suasana kejayaan pra-Islam yang mengandalkan tradisi duniawi yang dapat diibaratkan semacam suasana "jahiliah", pemujaan berhala dan perbuatan-perbuatan yang berlawanan terhadap ajaran syariat Islam.
2. Timbulnya perpecahan dalam negeri dan kurang berperannya lembaga-lembaga kerakyatan Butta Gowa, terutama lembaga Bate Salapang yang sesungguhnya menjadi sumber legitimasi dan kewenangan kekuasaan Raja Gowa. Kewenangan itu acapkali dilampaui (Mattulada, 1998).

Konflik yang terjadi kemudian dengan Kerajaan Bone yang mengakibatkan tercipta persekutuan dengan VOC dalam rangka menaklukkan Kerajaan Gowa kemungkinan didorong oleh keadaan-keadaan tersebut diatas (Mattulada, 1998). Dalam rangka

memperkuat pendapat Mattulada diatas, Setidaknya ada lima masalah pokok yang dihadapi oleh Gowa, yang kemudian menjadi akumulasi sebab runtuhnya Kerajaan Gowa yaitu:

1. Penunjukkan Sultan Hasanuddin dan Karaeng Karunrung sebagai dua penguasa Gowa memunculkan keraguan dari pihak internal Kerajaan Gowa sendiri. Keduanya dianggap pasangan yang tidak serasi (Mattulada, 1998).
2. Kebijakan yang dijalankan oleh kedua penguasa tersebut menunjukkan kekurangsamaan atau setidaknya memiliki perbedaan mencolok, khususnya dalam memperlakukan masyarakat Bugis Bone, yang nantinya memicu pemberontakan (Mattulada, 1998).
3. Munculnya rasa dendam dan kebencian dari rakyat jajahan khususnya masyarakat Bugis (Kerajaan Bone dan Soppeng)
4. Konflik dan persaingan dengan kerajaan-kerajaan luar Sulawesi Selatan khususnya Kerajaan Buton dan Ternate.
5. Konflik terbuka dengan Kompeni Belanda (VOC) (Andaya, 2013).

Tahun 1656, benteng Panakkukang berhasil direbut oleh kompeni Belanda setelah melewati perang dahsyat dengan pihak Kerajaan Gowa. Kemudian perang ini berakhir dengan gencatan senjata melalui perjanjian perdamaian 1 Desember 1660 (Andaya, 2013). Perang awal yang terjadi antara pihak Gowa dan Kompeni Belanda ini kemudian ternyata merupakan titik awal terjadinya perang terbesar di kawasan Indonesia Timur ini, setidaknya perang yang melibatkan tiga kekuatan besar yakni, Kerajaan Gowa beserta sekutu-sekutunya termasuk Luwu, Wajo dan beberapa kerajaan lokal lainnya berhadapan dengan kekuatan Kerajaan Bugis Bone dan Soppeng bersama dengan Kompeni Belanda beserta sekutu-sekutunya pula.

Kejayaan Butta Gowa tersebut bahkan melahirkan benih-benih konflik yang memicu terjadinya perang, sebagaimana dikemukakan Andaya, bahwa:

Pada pertengahan abad ke-17, kota pelabuhan Makassar berkembang sebagaimana didambakan para penguasa Goa. Kekayaan hasil dari perdagangan internasional menjadi alat yang menjamin reputasi Goa sebagai penguasa atasan tak terkalahkan di Sulawesi Selatan dan di banyak wilayah di luar pulau. Goa terkenal sangat kuat, kapal dagang dan duta yang datang ke Makassar bersaksi atas kebesaran Goa. Salah satu buktinya, ketika itu pemimpin Goa diperingati akan bahaya yang mungkin timbul dari meningkatnya jumlah kapal Eropa di perairan timur Nusantara. Namun bukannya surut, mereka malah memanfaatkan fenomena ini untuk kemakmuran mereka. Akan tetapi keberhasilan Goa harus diperoleh dengan menyemai kebencian orang Bugis Bone dan Soppeng dan menciptakan kecemburuan dari pesaing ekonomi didaerah ini. Gabungan dari dua faktor inilah kemudian yang kemudian membawa kejatuhan kerajaan Goa (Andaya, 2013).

Gambaran yang dikemukakan Andaya kemudian diakumulasikan dengan lima masalah pokok yang disebutkan sebelumnya, dihadapi oleh Gowa. Hal ini kemudian membuka arah menuju jalannya perang. Perang yang terjadi pada tahun 1666-1669 yang

lazim dikenal dengan sebutan Perang Makassar, perang ini merupakan titik kulminasi dari suatu proses latar belakang yang panjang. Dendam kesumat orang Bugis untuk melawan kesewenang-wenangan Kerajaan Gowa yang ditindaki dengan pelarian besar-besaran pada bulan Desember 1660 yang dipimpin oleh seorang tokoh bangsawan Bugis, Latenritatta Arung Palakka. Pelarian yang didorong oleh motivasi dan semangat menegakkan siri dan memenuhi panggilan pesse (Qahar, 2010). Keinginan itulah kemudian yang membawa Latenritatta Arung Palakka memenuhi kewajibannya untuk membela harkat dan martabat sebangsanya (Bugis) melalui perang.

Perang demi perang terus terjadi antara kedua kerajaan tersebut. Dimana kekalahan yang dirasakan oleh Bone dan perlakuan oleh kerajaan Gowa dianggap sebagai bagian dari siri (harga diri) bagi rakyat Bone, hingga Arung Palakka sebagai pejuang yang ingin mengembalikan harga diri (Azirah & Irfan, 2020). Pembebasan diri melalui perang ini ternyata tak mampu memenuhi harapan untuk melepaskan diri dari penjajahan Gowa dan kekalahan telah berada dipihak Arung Palakka dan sekutunya yang pada akhirnya melarikan diri menuju Buton dan pada akhirnya sampai ke Batavia. Dendam atas kekalahan perang ini, kemudian ditindaki dengan upaya mencari bantuan dan mengikrarkan persekutuan dengan pihak Kompeni Belanda untuk sama-sama menaklukkan Kerajaan Gowa.

Pagi 24 November 1666 ekspedisi kompeni berlayar ke Makassar beserta dengan sekutunya Latenritatta Arung Palakka dan tiba Desember 1666 (Andaya, 2013). Kembalinya Arung Palakka dengan sekutu barunya VOC setelah menjalani masa pengasingan selama 6 tahun telah mendorong rakyat Bugis Bone dan Soppeng untuk bangkit melawan kekuasaan Gowa. Perang melawan Gowa ini meliputi pertempuran dari darat dan laut yang memakan waktu hampir setahun lamanya dan pada akhirnya VOC dan Arung Palakka beserta sekutu-sekutu Bugisnya keluar sebagai pemenang (Ricklefs, 2010). Perang berakhir dan ditandai dengan Perjanjian Bungaya antara pihak Sultan Hasanuddin dan Speelman pada tanggal 18 November 1667 (Ricklefs, 2010). Secara de facto, kenyataan bahwa perang masih berlangsung oleh beberapa bangsawan Gowa yang tidak menerima perjanjian itu. Perang kembali pecah dan untuk kedua kalinya Gowa kalah telak ditandai dengan jatuhnya Benteng Somba Opu 24 Juni 1669 lambang kebesaran Butta Gowa (D, 1992). Dua hari kemudian, disepakatilah Perjanjian Bungaya berikutnya dengan pasal-pasal tambahan pada tanggal 27 Juni 1669 yang menandai berakhirnya secara resmi perang ini (Mattulada, 2011).

Setelah perjanjian ini maka menandai runtuhnya hegemoni Kerajaan Gowa, berakhirilah kebesaran dan keagungan Kerajaan Gowa-Tallo yang berlangsung selama kurang lebih tiga abad lamanya (Mattulada, 1998). Kekalahan ini awal dari babakan baru di Sulawesi Selatan, Gowa-Tallo sebagai negeri penguasa akhirnya kehilangan suzerainitasnya (kekuasaan dan pengaruh) atas kerajaan-kerajaan lain. Kemudian tampilah Kerajaan Bone

dan Soppeng sebagai hierarki yang paling berkuasa (Kartodirjo, 1992).

## KESIMPULAN

Perang Makassar (1666-1669) sebagai suatu momentum perubahan dalam segala aspek. Pasca perang ini, tatanan baru telah tercipta dengan tampilnya dua kekuatan besar di kawasan ini, Kerajaan Bone dibawah ketokohan Latenritatta Arung Palakka dan VOC dengan ketokohan Speelman. Pada tahun 1670 secara politis, Arung Palakka kemudian menjadi orang terkuat di Sulawesi Selatan sampai ia wafat pada tahun 1696 (Ricklefs, 2010). Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan dan kemenangan Arung Palakka harus "berbagi" dengan Speelman (VOC) (Andaya, 2013). Keduanya memiliki tujuan dan motif tersendiri yang dalam berbagai hal memiliki keinginan yang saling berbeda namun kerjasama dan persekutuan masih dapat terjaga sampai Arung Palakka meninggal dunia. Kedua penguasa ini seakan sadar bahwa kemenangan yang diperoleh akibat karena persekutuan antar keduanya yang oleh Mattulada disebut sebagai mitra yang setara sebagai penakluk. Seiring berjalannya waktu, Gowa pun takluk dan kini beralih ketangan penguasa baru, yakni Kerajaan Bone. Secara politik Kerajaan Bone selanjutnya memegang hegemoni kekuasaan sejak berakhirnya Perang Makassar sampai awal abad XX, dimana pada tahun 1905, Kerajaan Bone takluk dalam perang melawan Belanda dengan tertangkapnya Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri.

Hal yang tidak kalah menariknya dari perubahan politik ini yakni adalah perpindahan penduduk, Kenyataan bahwa setelah perang ini, bukan hanya terjadi pergantian penguasa baru dengan superioritasnya masing-masing tetapi ada hal tertentu juga yang terjadi yakni, migrasi besar-besaran penduduk wilayah ini ke luar daerah Sulawesi, mengarungi Nusantara menjadi perantau, pedagang bahkan sebagai bajak laut yang akhirnya membentuk komunitas diwilayah tempatnya menetap. Terkait dengan perekonomian dikawasan ini, dunia kemaritiman yang telah dibangun oleh Gowa kini pun berakhir. Kompeni Belanda kini menancapkan monopoli ekonominya di kawasan ini, dengan ketat berusaha mengontrol perniagaan dan perdagangan dijazirah ini agar tetap berada dalam kendali tunggal Kompeni Belanda. Menjadikan pelabuhan Makassar sebagai bandar perdagangan yang maju dibawah kendali monopoli Kompeni Belanda. Begitupun halnya dalam bidang agraris atau pertanian, wilayah-wilayah subur yang sebelumnya merupakan kekuasaan Kerajaan Gowa kini beralih dan dikuasai oleh Kompeni Belanda. Kompeni Belanda yang telah memantapkan kekuatannya secara politik kini berusaha pula memegang kendali ekonomi di jazirah ini.

## REFERENSI

- Abdul Qahhar. (2011). *Batarana Tana Bone Matasilompoe Manurungnge ri Matajang*. Yayasan Al Muallim.
- Ali, A. M. (1969). *Bone Selayang Pandang*. Dinas Kebudayaan Bone.

- Amir, M. (2018). *Dinamika Budaya Politik Kerajaan Bone*. Pangadereng, 4(2), 237-254.
- Andaya, L. Y. (2013). *Warisan Arung Palakka*. Innawa.
- Azirah, N., & Irfan, M. (2020). *Semangat Heroik dan Kepemimpinan Arung Palakka*. Sipatokkong, 1(1), 12-19.
- D, S. M. (1992). *Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari Ufuk Timur*. Balai Pustaka.
- Edward L. Poelinggomang dkk. (2004). *Sejarah Sulawesi Selatan (Jilid I)*. Balitbangda.
- Gibson, T. (2009). *Kekuasaan Raja, Syeikh, dan Ambtenaar*. Innawa.
- Habrianto, S., Madjid, S., & Ridha, R. (2019). *Ekspansi Kerajaan Gowa-Tallo Ke Limae Ajatappareng Abad XVI*. Pattingalloang, 6(3), 16.
- Hafid, A. (1989). *Sistem Pemerintahan Kerajaan Bone Abad Ke-17*. Universitas Hasanuddin.
- Hermin, Ahmadin, & Asmunandar. (2020). *Maudu' Lompoa : Studi Sejarah Perayaan Maulid Nabi Terbesar di Cikoang Kabupaten Takalar (1980-2018)*. Pattingalloang, 7(3), 284-296.
- Kartodirjo, S. (1992). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru:1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium (Jilid I)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Koro, N. (2006). *Ayam Jantan Tanah Daeng*. Ajuara.
- Madjid, D. H. M. S., Najamuddin, D., Patahuddin, D., Amiruddin, D. H., Ridha, D. M. R., Jumadi, D., Ahmadin, D., Junaedah, S., Bahri, Rahman, A., Amirullah, & Bustan. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. FIS Universitas Negeri Makassar.
- Malli, R., & Yahy, M. (2021). *Studi Komparatif Sistem Pemerintahan Kerajaan Gowa dan Bone dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Al Urwatul Wutsqa, 10(10), 1-13.
- Mattulada. (1998). *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Hasanuddin University Press.
- Mattulada. (2011). *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah*. Ombak.
- Mutmainnah, Najamuddin, & Ridhan, M. R. (2021). *Kerajaan Gowa Pada Masa Pemerintahan I Mangarangi Daeng Manrabbia 1593-1639*. *Jurnal Penikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah*, 19(1), 1-10.
- Nabba, A. P. P. (2016). *Sejarah Kerajaan Tanah Bone*. Yayasan Al Muallim.
- Patunru, A. D. (1989). *Sejarah Bone*. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Pelras, C. (2006). *Manusia Bugis*.
- Prabowo, M, A., & Kalsum, U. (2021). *Te'Seng Accounting As an Alternative in Realizing Sustainable Development Goals*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 565-582.
- Qahar, A. (2010). *Arung Palakka Datu Tungke'na Tana Ugi'E*. Yayasan Al Muallim.
- Ricklefs, M. . (2010). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*.
- Sewang, A. M. (2005). *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI-XVII)*.
- Yani, A. (2020). *Islmiasi di Ajatappareng Abad XVI-XVII*. *Pusaka*, 8(2), 191-210.
- Yulia, I. D., Ahmadin, & Amirullah. (2019). *Kelompok Tani Je'nemattallasa di Polongbangkeng Utara , Takalar*.